



NATION AND CHARACTER BUILDING: PERGULATAN IDE NASIONALISME, IDENTITAS DAN KOHESIVITAS MASYARAKAT MAJEMUK

Rika Kartika¹, Karim Suryadi², Rahmat³, Syaifullah⁴

¹ Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
Universitas Mohammad Husni Thamrin, Indonesia

^{2,3,4} Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia,
Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.15294/wr9pv566>

Submitted: 2025-02-06. Accepted: 2025-02-25. Published: 2025-02-26

ABSTRAK

Artikel ini membahas tantangan *nation and character building* dalam konteks masyarakat majemuk, dengan fokus pada bagaimana identitas yang majemuk dikelola dalam pembentukan karakter bangsa. Dalam era globalisasi, setiap negara dihadapkan pada tantangan mempertahankan jati diri bangsa serta mengelola potensi konflik identitas yang muncul. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode kajian pustaka, penelitian ini mengkaji bagaimana nasionalisme, identitas etnis, dan agama dapat dikelola agar tidak mengancam integrasi sosial. Berdasarkan analisis berbagai praktik di berbagai negara, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan identitas harus dilakukan secara proporsional dan inklusif agar dapat memperkuat kohesivitas sosial, serta mendukung pembangunan karakter nasional yang positif. Selain itu, pendidikan dan kebijakan memegang peran penting dalam menciptakan kohesi dan integrasi yang mendalam dalam masyarakat majemuk. Rekomendasi dari penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung dialog antar kelompok etnis, agama sebagai cara untuk memperkuat nasionalisme yang sehat, mencegah disintegrasi, dan mencapai pembangunan bangsa yang lebih stabil dan harmonis.

Kata Kunci : Pembangunan karakter bangsa, nasionalisme, identitas, etnis, integrasi

ABSTRACT

This article discusses the challenges of nation and character building in the context of a pluralistic society, focusing on how pluralistic identities are managed in the formation of national character. In the era of globalization, every country is faced with the challenge of maintaining national identity and managing potential identity conflicts that arise. Using a qualitative approach and literature review methods, this study examines how nationalism, ethnic identity, and religion can be managed so as not to threaten social integration. Based on an analysis of various practices in various countries, this study shows that identity management must be carried out proportionally and inclusively in order to strengthen social cohesion and support the development of positive national character. In addition, education and policy play an important role in creating deep cohesion and integration in a pluralistic society. The recommendations of this study emphasize the importance of policies that support dialogue between ethnic and religious groups as a way to strengthen healthy nationalism, prevent disintegration, and achieve more stable and harmonious national development.

Keywords: Nation and character building, nationalism, identity, ethnicity, integrat

PENDAHULUAN

Pada tahun 2022 tepatnya bulan Februari, militer Russia memulai invasi terbuka ke Ukraina seperti pada wilayah Kyive, Kharkiv, Sumy, Berdyansk, Odesa, dan Chernihiv. Akibat serangan tersebut menyebabkan lebih dari 1,1 miliar janda perang dan anak yatim piatu di Ukraina telah terkena dampaknya (Octavia & Husniyah, 2023). Masyarakat dunia terkejut karena kedua negara sejatinya memiliki sejarah yang panjang, termasuk sama-sama menjadi bagian dari Uni Soviet sampai 1990 (Widiasa, 2018). Meski banyak peristiwa yang melatari konflik tersebut mulai dari campur tangan North Atlantic Treaty Organization (NATO), motivasi Vladimir Putin yang ingin membangkitkan Rusia sebagai kekuatan dominan, dan pihak Kyive yang melanggar kesepakatan dengan Moscow, namun satu hal terpenting adalah bahwa kedua negara memiliki sedikit-banyak kesamaan budaya dan sejarah (Education, 2007). Nyatanya, modal tersebut ternyata tidak menjamin keduanya terbebas dari konflik.

Untuk pihak Ukraina, perang melawan Rusia tidak hanya terkait dengan integritas teritorial dan kedaulatan nasional. Melainkan juga tentang perjuangan menegaskan identitas atau jati diri bangsa. Jauh sebelum kemerdekaan Ukraina 1991, perlawanan negara tersebut telah muncul sejak 1917, dimana saat itu Ukraina juga berusaha memerdekakan diri dari Imperium Rusia yang terancam tercerai berai akibat pergolakan yang dipicu Revolusi Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin (Chrisnandi, 2019). Lebih jauh ke belakang, selama 600 tahun setelah invasi Mongol di Eropa pada abad ke-13, Ukraina menjadi rebutan kekuatan-kekuatan besar Eropa masa silam, mulai dari Persemakmuran Polandia-

Lithuania, Kekaisaran Austro-Hungaria, Turki Usmani, sampai akhirnya masuk kekuasaan Imperium Rusia pada abad ke-17 (Hossein-Zadeh, 2014; Zulfahmi, 2023). Semua potongan sejarah tersebut berkembang menjadi gerakan nasionalis selama Revolusi Bolshevik pada

tahun 1917, yang membubarkan Tsarisme Rusia dan memperkenalkan Marxisme-Komunisme (Yusuf, 2014). Selama periode tersebut, nasionalisme Ukraina menyebabkan berdirinya Republik Rakyat Ukraina, yang mencakup delapan provinsi Kekaisaran Rusia: Kiev, Volhynia, Kharkov, Kherson, Yekaterinoslav, Poltava, Chernigov, dan Podolia (Kotenko, 2020). Meskipun demikian, kaum Bolshevik berhasil mengonsolidasikan otoritas di seluruh Ukraina, yang akhirnya menggusur Republik Rakyat Ukraina dan mendirikan Republik Sosialis Soviet Ukraina, yang menjadi anggota pendiri Uni Soviet pada tahun 1922 (Trotsky, 2010).

Pencarian identitas rakyat Ukraina terus berlanjut hingga mereka kembali bersemangat untuk meraih kemerdekaan sejati pada tahun 1991. Pada tahun itu, saat Uni Soviet bubar, 91 persen warga Ukraina memberikan suara mereka untuk kemerdekaan (Bakers, 2019).). Selama periode itu, identitas nasional Ukraina belum terbentuk dengan baik. Setelah invasi besar-besaran Rusia pada tanggal 24 Februari 2022, kebutuhan akan identitas yang bersatu sebagai bangsa dan negara Ukraina semakin meningkat. Sebuah studi pada bulan Juli 2023 yang dilakukan oleh Institut Sosiologi Internasional Kyiv (KIIS) mengungkapkan bahwa 85 persen warga Ukraina mengidentifikasi diri mereka sebagai warga Ukraina. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 20 persen dari 64,4 persen pada tahun sebelumnya (Sidik, 2023).

Di dalam sejarah Indonesia, konflik terkait dengan identitas juga terjadi dalam perjalanan bangsa (Nafi'ah, 2020). Munculnya separatisme Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku Gerakan Aceh Merdeka di Aceh (Hartati, 2010) atau konflik agama di Ambon, Poso, Sampit merupakan kasus-kasus konflik terkait identitas suku, agama dan etnis (Romli, 2015). Konflik-konflik tersebut juga diperparah dengan faktor-faktor di luar agama seperti politik lokal, dimana terjadi ketidakpuasan terhadap distribusi kekuasaan dan sumber

daya lokal, serta rivalitas politik antar kelompok (Baidhawry, 2005). Hingga tahun 2024 konflik yang terjadi di Papua masih menjadi pekerjaan rumah, dimana Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga terus menjalankan pemberontakan, dan diplomasi di luar negeri (Siagian, 2023). Berbagai peristiwa di atas menuntun kita pada satu pertanyaan kritis, bagaimana seharusnya identitas yang majemuk dikelola oleh sebuah bangsa? Bagaimana identitas menjadi faktor dalam pembentukan karakter nasional? Bagaimana seharusnya identitas memberi kontribusi dalam *nation and character building*?

Konsep pembangunan bangsa memiliki akar yang terletak pada pembentukan negara dan kerajaan di masa lalu. Pendirian Kekaisaran Romawi, misalnya, merupakan tugas besar dalam mengintegrasikan beragam masyarakat dan budaya di bawah struktur politik dan sosial yang terpadu (Mustakim, 2011). Demikian pula, dinasti Tiongkok berfokus pada penciptaan negara terpusat yang dapat menahan perpecahan internal dan ancaman eksternal. Masa kolonial berdampak signifikan terhadap proses pembangunan bangsa di banyak negara. Kekuatan kolonial sering kali menetapkan batas negara secara sewenang-wenang, mengelompokkan beragam kelompok etnis dan budaya menjadi satu kesatuan politik. Perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan kolonial di Afrika, Asia, dan Amerika Latin menyebabkan munculnya negara-negara baru yang dihadapkan pada tugas mendesak untuk membangun identitas nasional yang kohesif dari gabungan kelompok-kelompok yang berbeda. Pada era pasca-kolonial, upaya pembangunan bangsa sering kali ditandai dengan tantangan mengatasi warisan kolonialisme, antara lain ketergantungan ekonomi, fragmentasi sosial, dan ketidakstabilan politik. Para pemimpin seperti Kwame Nkrumah di Ghana, Jawaharlal Nehru di India, dan Sukarno di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk identitas

nasional negara mereka masing-masing (Antara, 2020).

Francis Fukuyama, ilmuwan politik AS keturunan Jepang mengungkapkan, fenomena politik Abad XXI tak lain adalah masalah identitas. Maka dengan memahami masalah identitas tersebut, akan membuka peluang lebih baik untuk memahami dinamika politik modern (Fukuyama, 2022). Bicara mengenai identitas, diksi ini berkaitan dengan atribut khas seseorang atau anggota kelompok atau kategori sosial tertentu. Identitas berasal dari istilah Latin "idem," yang berarti kesamaan (Santoso, 2006). Akibatnya, identifikasi mencakup gagasan tentang kesamaan atau kesatuan dengan orang lain dalam konteks tertentu, sekaligus juga mencakup konsep keberagaman. Identitas juga dapat merujuk pada karakteristik yang membedakan individu atau organisasi dari yang lain. Akibatnya, identitas memiliki dua interpretasi: hubungan kemiripan dan hubungan perbedaan (Liliweri, 2018). Hubungan kesamaan dalam identitas terjadi ketika seseorang memiliki karakteristik yang sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. Perbedaan dalam identitas terjadi ketika seseorang atau kelompok memiliki karakteristik yang membedakan mereka dari yang lain. (Rummens dalam Santoso, 2006 : 45).

Lebih jauh, identitas individu dapat terwujud sebagai identitas pribadi dan identitas sosial. Identitas pribadi muncul dari identifikasi diri dan penilaian orang lain. Identitas pribadi adalah karakteristik khas yang dimiliki oleh individu yang membedakannya dari orang lain (Rahayu & Hero, 2021). Identitas pribadi dapat terwujud melalui atribut fisik, seperti fitur wajah dan perawakan, atau ciri psikologis, termasuk temperamen, perilaku, dan cara berbicara. Identitas sosial muncul dari identifikasi diri individu sebagaimana diakui dan disetujui oleh pelaku sosial. (Rummens dalam Santoso, 2006). Identitas sosial adalah kesadaran dan pengakuan individu terhadap keanggotaannya dalam suatu kelompok, serta pengakuan kelompok

terhadap individu sebagai anggota (Giles dan Johnson, 1987).

Teori identitas sosial dirumuskan oleh Henry Tajfel dan John Turner. Teori identitas sosial adalah kerangka kerja psikologi sosial yang meneliti penciptaan konsep diri dalam kaitannya dengan keanggotaan kelompok, dinamika dalam kelompok, dan interaksi antarkelompok (Sugarda, 2022). Pendekatan ini pada dasarnya didasarkan pada premis bahwa perilaku kolektif tidak dapat dipahami atau dijelaskan hanya melalui proses atau interaksi tingkat individu; sebaliknya, perilaku kolektif dipengaruhi oleh konstelasi nilai, norma, karakteristik, atau pola perilaku yang berkembang dan dianut bersama dalam suatu kelompok (Afif, 2015:02). Menurut teori identitas sosial, perilaku individu dipengaruhi bukan oleh pengambilan keputusan yang otonom, tetapi oleh identifikasi diri dengan kelompok yang melingkupinya. Akibatnya, identitas sosial merupakan komponen konsep diri individu yang berasal dari kesadaran mereka dalam suatu kelompok, di mana mereka secara sadar menginternalisasi nilai-nilai, terlibat, dan menumbuhkan rasa keterikatan dan kebanggaan dalam kolektif mereka (Umikalsum & Fauzan, 2019).

Identitas sosial merupakan atribut atau status khas suatu kelompok. Ini menandakan bahwa manusia terkait erat dengan faktor-faktor lingkungan. Hogg dan Abrams sebagaimana dikutip oleh Nuraeni mendefinisikan identitas sosial sebagai rasa keterhubungan, kepedulian, dan kebanggaan yang berasal dari kesadaran individu akan beragam jenis keanggotaan sosial dengan orang lain (Agustin, 2017). Henry Tajfel merupakan tokoh terkemuka dalam teori identitas sosial. Tajfel mengkarakterisasi identitas sosial sebagai kesadaran individu akan kepemilikan terhadap suatu komunitas yang memiliki perasaan dan cita-cita yang sama (Zamzami, 2020). Identitas sosial merupakan konsep diri individu sebagai bagian dari suatu kolektif. Identitas dapat terwujud dalam bentuk negara, ras, etnis, status sosial ekonomi, agama, usia, jenis

kelamin, suku, keturunan, dan faktor-faktor lainnya.

Konsep identitas sosial biasanya dikaitkan dengan hubungan antarpribadi dan dinamika masyarakat yang melekat (Hogg & Abrams, 2000). Gagasan Tajfel tentang identitas sosial menyatakan bahwa individu secara konsisten berusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan harga diri mereka, sehingga berusaha untuk menumbuhkan citra diri yang positif. Kedua, kelompok atau kategori sosial dan anggotanya terkait dengan asosiasi nilai positif atau negatif (C. Kusuma, 2018). Identitas sosial dapat dianggap baik atau buruk berdasarkan penilaian, yang berkaitan dengan konsensus sosial, bahkan di antara kelompok yang berbeda, pada kelompok yang membentuk identitas sosial individu (Corneliya Saba, 2018). Dalam konteks yang lebih luas, identitas sosial juga berperan dalam membangun kesadaran kebangsaan, yang menjadi dasar dari konsep nasionalisme. Secara etimologi kata nasionalisme adalah bahasa Latin. Nasionalisme berasal dari kata *nation*, dari kata *nascor* yang bermakna: “*saya dilahirkan*” (aku lahir). Nasionalisme dapat dimaknai sebagai sebuah kelompok masyarakat yang berasal dari wilayah yang sama, atau dlahirkan di wilayah yang sama (Susilo & Rasul, 2009).

Benedict Anderson menunjukkan bahwa negara adalah komunitas yang dibangun secara sosial, yang dibayangkan oleh orang-orang yang menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok tersebut (Anderson, 2020). Gagasan ini menekankan peran narasi budaya dan sejarah dalam menciptakan rasa identitas bersama. Sedangkan Ernest Gellner menyoroti teori nasionalisme merupakan transisi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, dimana kebutuhan akan identitas budaya yang homogen menjadi penting untuk stabilitas ekonomi dan politik (Ernada et al., 2024). Nasionalisme dalam konteks ini berfungsi sebagai kekuatan pemersatu yang menyelaraskan identitas individu dan

kolektif dengan tujuan bernegara (Asril et al., 2023).

Nasionalisme lahir sejak abad pertengahan pada Bangsa Eropa Barat dan terus berkembang pada abad modern (Aziz, 2011). Pada awal kemunculannya, nasionalisme lahir sebagai antitesa dari kosmopolitanisme yang memunculkan kemarahan orang Jerman dan bangsa Eropa lainnya yang merasa tidak dilibatkan dalam paradigma rasionalisme Pencerahan Perancis (Tampi, 2015). Muncul pada abad ke 15, istilah nasionalisme mengacu pada sekelompok siswa dari wilayah yang sama dan mempelajari Bahasa Jerman. Abbe Barruel menyatakan bahwa nasionalisme adalah tentang bagaimana mempertahankan kecintaan pada wilayah asal dan keinginan untuk mempertahankan identitasnya (Nurvita, 2018). Nasionalisme, karena nasionalisme merupakan fondasi awal dalam membangun identitas dan karakter sebuah bangsa. Nasionalisme merupakan tools dalam menciptakan kesadaran kolektif yang mendorong masyarakat memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap bangsanya. Nasionalisme membentuk nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, gotong royong, dan integritas yang menjadi dasar dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, nasionalisme bukan hanya sebuah konsep politik, tetapi juga elemen fundamental dalam membangun karakter individu yang berkontribusi pada kemajuan bangsa secara keseluruhan (Hamid, 2012).

Ernest Renan dalam bukunya *What is a Nation?* yang menyatakan bahwa “*A nation is a soul, a spiritual principle*”. Pandangan tersebut merupakan pernyataan yang menjadi dasar kuatnya hubungan antara nasionalisme dan *nation and character building* (Renan, 2002). Pemikiran ini menegaskan bahwa nasionalisme bukan hanya tentang batas wilayah, tetapi juga tentang kesadaran kolektif yang menjadi fondasi pembentukan karakter bangsa. Dalam konteks pendidikan karakter, menekankan bahwa nilai-nilai kebangsaan harus ditanamkan dalam sistem pendidikan untuk menciptakan warga

negara yang bertanggung jawab dan berintegritas. Dengan demikian, nasionalisme tidak hanya menjadi alat politik, tetapi juga pilar utama dalam membangun karakter bangsa yang kokoh (Lickona, 1991).

Di bawah kolonialisme, nasionalisme dan patriotisme memiliki irisan yang sama, yakni mulai bergesernya makna bahwa nasionalisme adalah ada perjuangan melawan kolonialisme (Saraswati et al., 2021). Ideologi nasionalis mendorong gerakan-gerakan di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia untuk menggantikan kendali Eropa dengan kedaulatan pribumi (Iramdhan, 2017). Nasionalisme merupakan sentimen yang berdasar pada karakteristik budaya umum yang mengikat suatu populasi dan seringkali kebijakan kemerdekaan atau separatisme nasional (Liliweri, 2018).

Terjadi lebih dari sepuluh kasus disintegrasi di abad 20. Korea Utara-Korea Selatan (1948), Jerman Barat-Jerman Timur (1949), Malaysia-Singapura (1965), dan Uni Soviet (1990) semua negara-negara tersebut mengalami perpecahan pada abad ke-20. Sejak tahun 1945 sampai 1995 tercatat perang terjadi sebanyak 38 kasus, 64 gerakan separatis, dan konflik ideologi sebanyak 62 kasus. Di Afrika terdapat 21 kasus separatisme di benua Afrika dan 12 di Timur Tengah. Asia Selatan memiliki sepuluh kasus, Asia Tenggara sebelas, Asia Timur satu, dan Eropa Timur dua. Sedangkan Eropa Barat memiliki dua kasus, sementara Uni Soviet memiliki lima kasus (Kusumawardani & Faturochman, 2004).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka untuk menganalisis bagaimana nasionalisme, identitas etnis, dan agama dikelola dalam proses *nation and character building*. Data dikumpulkan melalui analisis literatur yang mencakup artikel, buku, serta laporan kebijakan yang relevan dengan topik. Teknik analisis dilakukan dengan cara sintesis konsep-konsep utama dari berbagai

sumber yang ada, serta mengidentifikasi pola-pola dalam pengelolaan identitas nasional dan sosial (Creswell, 2010). Pendekatan kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan teoretis yang mendalam terkait hubungan antara nasionalisme dan integrasi sosial dalam masyarakat majemuk (Bryman, 2016). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang cara mengelola identitas di era globalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nasionalisme dan Identitas: Problem Saat Ini dan Masa Depan

Dalam artikelnya *Nasionalisme Kini dan Esok* yaitu, Benedict Anderson menyatakan bahwa diperlukan jiwa besar rakyat Indonesia sebagai bangsa bagi keberlangsungan hidupnya. Nasionalisme atau spirit kebangsaan adalah upaya yang harus dirawat secara kolektif (Anderson, 1999). Secara nasional, Indonesia harus bisa belajar dari negara-negara yang telah hancur sebagai konsekuensi dari semangat yang kerdil (Kusumawardani & Faturachman, 2004). Pasca berakhirnya fase kolonial negara bangsa memang dihadapkan pada problem menjaga dan merawat nilai kebersamaan dalam keberagaman. Tantangan yang dihadapi negara-bangsa kontemporer adalah mengakui dan memvalidasi perbedaan sambil membangun identitas nasional yang mencakup beragam aspirasi dari berbagai kelompok dalam negara-bangsa (Habibah, et al., 2022).

Nasionalisme merupakan sesuatu yang dinamis, dia bukan sesuatu yang statis dan beku, ini diungkapkan oleh Hans Kohn bahwa sebuah bangsa adalah hasil dari kehidupan dalam sejarah, selalu “dingin”, tetapi tidak pernah beku, ia selalu dinamis (Kohn, 1984). Hanya ketika ada kemauan untuk bertahan hidup, sebuah bangsa dapat muncul, hadir dan terbentuk. Perasaan senasib yang sama, keberadaan jiwa dan institusi dan spirit yang besar dan setia tidak dibentuk oleh kesetaraan ras, bahasa, agama, atau perbatasan negara, melainkan

oleh pengalaman sejarah. Dengan modal tersebut sebuah komunitas bersedia melakukan pengorbanan bersama.

Nasionalisme adalah kesadaran dan kebanggaan bangsa yang mengusung sikap juga perasaan yang menempatkan porsi kepentingan bangsa yang lebih besar pada kepentingan pribadi atau kelompok (F. A. Kusuma, 2015). Nasionalisme juga dapat dilihat sebagai proses *nation building* yang mengubah kesetiaan sebuah masyarakat yang sebelumnya loyalitas hanya terbatas pada suku, agama, etnis, dan kebangsaan berubah menjadi loyalitas kepada bangsa dan negara (Martaniah, 1990). Nasionalisme adalah kekuatan dahsyat yang memotivasi individu untuk bertindak dan mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Meski nasionalisme merupakan sebuah amunisi yang dibutuhkan sebuah negara, nasionalisme di lain pihak kini menimbulkan problem. Dunia pernah mengalami tragedi yang disebabkan oleh nasionalisme sempit yang diusung oleh Hitler (Zahrotunnimah, 2018).

Rosa Luxemburg pada 2016 mencatat bahwa kekuatan nasionalisme sayap kanan diberbagai negara mulai terus meningkat (Felani & Rochani Adi, 2022). Di Amerika misalnya, kemenangan Donald Trump di tahun 2016 yang disebut sebagai kelompok kanan yang kerap memanfaatkan isu populis. Ia menggelorakan slogan kampanye, “*Make America Great Again*” atau biasa dikenal dengan MAGA (Taufik & Pratiwi, 2021). Setelah itu, terjadi peristiwa besar, saat muncul gelombang dukungan baik dalam bentuk tagar di *social media* maupun demonstrasi di jalanan kota-kota di AS yang mengusung semangat *Black Lives Matter* karena brutalisme dan rasisme aparat terhadap kulit hitam (Nugraheni, 2021). Slogan MAGA dinilai mengancam stabilitas politik internasional karena sikap anti-imigran dari pemerintahan Trump, khususnya terhadap pencari kerja asing (Pulungan, 2023).

Muncul kebijakan-kebijakan yang cenderung diskriminatif terhadap warga Amerika keturunan seperti kebijakan imigrasi yang diambil Trump

mengakibatkan ribuan keluarga terpisah satu sama lain dan 545 anak tidak bisa bertemu orangtuanya karena di deportasi ke negara asalnya (BBC News Indonesia, 2020). Kebijakan kontroversial lainnya adalah ketika Trump memutuskan untuk membangun tembok Perbatasan Selatan dengan wilayah Meksiko (Bredemeier, 2019). Cerita yang sama terjadi di India, dimana sejak berkuasanya *Bharatiya Janata Party (BJP)* dengan Narendra Mody sebagai Perdana Menteri. BJP menganut aliran nasionalisme Hindu yang mayoritas (Dzaky, 2024). Namun karena kampanye yang berlebihan, membuat para pendukung BJP mendapat ruang untuk melakukan kekerasan terhadap pihak yang minoritas. Hindutva dijadikan ideologi partai oleh BJP, yang diduga diskriminatif terhadap Muslim di India (Febriansyah, 2023). Sumit Ganguly, seorang profesor ilmu politik di Indiana University, menulis dalam *The Conversation* bahwa selama lima tahun pemerintahan sebelumnya, Modi mulai menunjukkan ketidakpedulian dan ketidakadilan terhadap Muslim. Hingga tahun 2019, sebanyak 36 orang Muslim tewas (Nathaniel, 2020).

Fenomena serupa muncul di Asia ketika muncul Ashin Wirathu di Myanmar yang memimpin genosida terhadap orang-orang keturunan Rohingya. Pemerintah Myanmar disinyalir melakukan pembiaran dan pengabaian hak-hak kelompok minoritas tersebut untuk mendapatkan hak-haknya (Tindaon, 2012). Nasionalisme yang tidak sesuai porsinya menjadikan sebuah bangsa terjebak pada sikap yang sifatnya *chauvinistik* dan diskriminatif (Hadziq, 2019). Identitas agama, suku/etnis yang merangsang perpecahan terjadi ditengah masyarakat. Multikulturalisme sebagai pendekatan yang mempromosikan pengakuan, penghargaan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, menjadi semakin penting di era ini (Habibah et al., 2023).

Tantangan Negara Bangsa: Merawat Kohesi dan Integrasi Sosial

Kohesi sosial berfokus pada integrasi kelompok sosial yang berbeda menjadi satu kesatuan. Karya Émile Durkheim tentang solidaritas sosial menggarisbawahi pentingnya nilai dan norma bersama dalam menjaga stabilitas masyarakat (Hidir & Malik, 2024). Dalam konteks pembangunan bangsa, membina kohesi sosial melibatkan penciptaan kebijakan dan institusi inklusif yang mendorong persatuan dan mengurangi kesenjangan (Leylana & Sarjito, 2024). Indonesia adalah negara yang khas dengan keberagaman yang dimilikinya. Namun ternyata bukanlah hal yang sederhana untuk dapat mengumpulkan data jumlah suku. Menurut Bauman mendefinisikan etnisitas itu sulit (Bauman, 2004). Secara umum, seseorang mengidentifikasi diri dengan kelompok etnis tertentu berdasarkan keturunan, gaya hidup, bahasa, hubungan kekerabatan, atau bahkan faktor politik. Akibatnya, dalam sensus atau survei, pertanyaan dibiarkan terbuka dan digunakan metode identifikasi diri, dengan mencatat suku berdasarkan pengakuan responden. Selanjutnya, untuk memudahkan analisis data etnis, setiap tanggapan responden diberi kode. Pemerintah Belanda menghasilkan data etnis pertama di Indonesia melalui Sensus Penduduk (SP) tahun 1930. Namun, pada masa Orde Baru, pendataan ini terhenti karena dianggap sesuatu yang tabu ketika terjadi pembahasan etnisitas. Hal tersebut dianggap sesuatu yang dapat membahayakan keutuhan bangsa. Baru tujuh puluh tahun kemudian, pada era Reformasi, Badan Pusat Statistik kembali mengumpulkan data kesukuan melalui SP2000, yang dilanjutkan pada SP2010. Terdapat 1331 kategori suku yang dimiliki oleh BPS (BPS, 2015).

Menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip Garna, Indonesia memiliki sekitar 577 hingga 660 suku bangsa. Masing-masing suku tersebut dapat dibedakan dari bahasa yang digunakan sehari-hari (Garna, 1993). Keragaman

tersebut menjadi sebuah potensi baik potensi positif maupun negatif. Berbagai upaya dilakukan untuk menghadirkan keharmonisan dan kerukunan di tengah perbedaan budaya, bahasa daerah, agama, etnis dll. Proses menghadirkan kerukunan bukan hal sederhana dan mudah untuk diwujudkan. Sentimen etnis, agama kerap menjadi penghalang dan menjadi pemicu pecahnya konflik di tengah masyarakat. Sehingga konflik sosial adalah fakta yang rentan untuk terus berulang terjadi di tengah masyarakat (Umikalsum & Fauzan, 2019).

Kondisi tersebut membutuhkan sebuah formula yang strategis agar persatuan dan kesatuan dapat tercipta. Proses saling memahami perbedaan dan menerima perbedaan di tengah keberagaman membutuhkan perhatian agar integrasi sosial dapat terwujud. Proses tersebut dikenal dengan integrasi sosial yang dipahai sebagai sebuah proses penyesuaian untuk dapat saling memahami, menerima kondisi, pandangan dan perilaku dalam satu tatanan kehidupan sosial yang harmonis (Said, 2009,).

Talcott Parson adalah sosiolog yang mengembangkan paradigma fungsionalisme struktural. Paradigma ini memiliki rumusan bahwa masyarakat dipahami sebagai sistem sosial yang terikat dalam keseimbangan (Herawati, 2023). Dua hal pengertian dasar integrasi nasional adalah pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial serta mempersatukan unsur yang berada di tengah masyarakat agar tercipta ketertiban (Ernas, 2014). Pemahaman ini mengandung makna bahwa proses integrasi dalam masyarakat demokratis tidak menutup mata akan hadirnya konflik sebagai bagian dari fenomena serta perubahan sosial. Meskipun demikian, potensi konflik tidak harus dihadapi dengan kekuatan hegemonik tersebut. Potensi konflik harus dikelola dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak oleh masyarakat juga negara (Yuliantoro, 2021).

Integrasi sosial dapat terwujud apabila masyarakat memiliki modal sosial berupa kepercayaan (*trust*) dan pengakuan

terhadap perbedaan dan hak perbedaan tadi untuk dapat hadir dan hidup ditengah masyarakat (Kalsum & Fauzan, 2020). Terdapat beberapa model dalam pembangunan integrasi sosial Menurut Parekh, yaitu: model proseduralis, model asimilasi, dan model millet (Nurhayati et al., 2021). Model prosedural adalah model pluralis yang ada dalam masyarakat yang tidak bisa diabaikan. Untuk menyelenggarakannya tidaklah mudah, sehingga kehadiran pemerintah sebagai penyelenggara sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya ketentraman dan stabilitas masyarakat. Dalam model ini, peraturan-peraturan yang disampaikan atau dikeluarkan oleh pemerintah harus ditegakkan oleh pemerintah bagi warganya, agar warga setempat selalu merasa diperlakukan dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, model asimilasionis. Model ini didasarkan pada nilai-nilai budaya bersama peran struktural dan sosial. Model ini pada hakikatnya selalu mengutamakan komunikasi dan interaksi antar identitas yang beragam. Integrasi ke dalam masyarakat yang ketiga adalah model Millet. Model Millet tidak diharapkan untuk mengintervensi masalah internal, tetapi harus mengakui keberadaan lembaga warga yang otonom dan menjalankan adat budayanya, dan setiap individu dapat mempertahankan kesetiiaannya kepada kelompok tertentu yang memiliki tujuan menjaga negara (Karn et al., 1998).

Integrasi sosial memiliki tahap yaitu pertama-tama kontrol atas kesenjangan ataupun konflik serta penyimpangan sosial dari suatu sistem sosial tertentu, dan kedua proses tersebut mempersatukan unsur-unsur dalam suatu masyarakat dalam menciptakan tatanan sosial (Respa, 2023). Menurut definisi di atas, integrasi sosial adalah suatu proses menyatukan masyarakat yang beragam, namun secara serasi dan selaras dalam kehidupan sosial dan politik serta budaya (Ritzer & Goodman, 2009). Integrasi sosial merupakan proses dan hasil dari mana individu atau kelompok dalam masyarakat yang awalnya terpecah belah,

berbeda, atau bahkan bersaing atau berkonflik menjadi damai, harmonis, baik dalam hal kepentingan, kehidupan-kematian, atau dalam hal pandangan tentang berbagai isu fundamental dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat (Soedarno et al., 1992).

Secara sosiologis, integrasi sosial adalah proses penyesuaian ke berbagai aspek sosial, termasuk norma, nilai, konvensi, sistem agama, peran sosial, dan lembaga sosial (Carr et al., 2018). Dalam konteks Indonesia, integrasi sosial dapat dipahami sebagai sebuah proses mempersatukan bermacam-macam kelompok sosial untuk menghadirkan kehidupan berbangsa yang dinamis namun juga sehat, adil, demokratis sesuai nilai Pancasila dan UUD 1945. Komponen-komponen ditengah masyarakat plural seperti di Indonesia mengalami proses pembentukan identitasnya baik itu etnisitas, kelompok maupun agama.

Strategi Pembangunan Karakter: Pengembangan Individu dan Kolektif Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Pembangunan karakter pada tingkat individu melibatkan pengembangan nilai-nilai moral dan etika. Sistem pendidikan memainkan peran penting dalam proses ini dengan menanamkan kebajikan seperti kejujuran, integritas, rasa hormat, dan tanggung jawab. Para filsuf seperti Aristoteles telah lama menekankan pentingnya etika kebajikan, yang berfokus pada karakter agen moral daripada konsekuensi tindakan mereka (Mulkhan et al., 2018).

Selama ini lembaga pendidikan berfungsi sebagai tempat integrasi sosial, mempertemukan siswa dari berbagai latar belakang dan mendorong saling pengertian dan rasa hormat. Simbol-simbol nasional seperti bendera, lagu kebangsaan, dan monumen mempunyai peranan penting dalam pembangunan bangsa dengan mewujudkan nilai-nilai dan sejarah bangsa. Implementasinya dilakukan melalui banyak metode salah satunya pembelajaran nilai-

nilai karakter di dalam kelas (Aryadiningrat et al., 2023). Hal tersebut membantu menciptakan memori kolektif dan rasa memiliki di antara warga negara. Hal penting lainnya yang juga strategis adalah pemanfaatan media. Media merupakan alat yang ampuh dalam membentuk identitas dan karakter bangsa (Rachmiate, 2016). Penggambaran positif atas prestasi dan teladan nasional dapat menimbulkan kebanggaan dan rasa persatuan. Namun, media juga dapat menyebarkan narasi yang memecah belah. Jurnalisme yang bertanggung jawab yang mendorong kohesi sosial dan dialog yang konstruktif (Aiqani et al., 2023).

Identitas, nasionalisme dapat memberikan kontribusi terhadap *nation and character building*. Proses panjang *nation and character building* merupakan kondisi dinamis yang melibatkan interaksi faktor sejarah, sosial, dan politik. Pembangunan bangsa yang efektif memerlukan penciptaan identitas nasional yang inklusif dan dapat diterima oleh masyarakat yang beragam, sedangkan pembangunan karakter berfokus pada pengembangan landasan moral dan etika setiap individu. Bersama-sama, proses-proses ini berkontribusi pada stabilitas, kemakmuran, dan kohesi masyarakat. Seiring dengan perkembangan dunia, prinsip-prinsip pembangunan bangsa dan karakter harus beradaptasi untuk mengatasi tantangan dan peluang yang muncul, memastikan kelanjutan pembangunan negara-negara yang kuat dan tangguh. Globalisasi selain menghadirkan peluang dan tantangan namun juga menimbulkan ancaman terhadap identitas nasional melalui homogenisasi budaya dan terkikisnya identitas lokal.

Menyeimbangkan integrasi global dengan pelestarian identitas nasional merupakan tantangan penting bagi negara-negara modern. Ketidakstabilan dan konflik politik yang kerap meruncing masih menjadi hambatan besar bagi pembangunan bangsa dan karakter. Di wilayah-wilayah yang dilanda perang saudara, pertikaian etnis, dan korupsi politik, upaya membangun identitas

nasional yang kohesif sering kali terhambat. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan strategi komprehensif yang mencakup penyelesaian konflik, tata kelola yang inklusif, dan peningkatan keadilan sosial. Kemajuan teknologi mengubah masyarakat dan cara individu berinteraksi. Media sosial, misalnya, telah mengubah komunikasi dan penyebaran informasi, sehingga berdampak pada narasi dan identitas nasional. Memanfaatkan teknologi untuk pembangunan bangsa dan karakter yang positif memerlukan pendekatan inovatif yang mendorong literasi digital, pemikiran kritis, dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

Selain itu, kebijakan sangat penting untuk membina kohesi sosial dan integrasi yang mendalam dalam berbagai komunitas. Negara-negara yang dicirikan oleh keragaman etnis, agama, dan budaya sering kali mengalami kesulitan dalam mendamaikan perbedaan-perbedaan ini untuk membina stabilitas dan perdamaian masyarakat. Dalam lingkungan ini, langkah-langkah yang memfasilitasi komunikasi lintas kelompok etnis dan agama sangat penting untuk memperkuat nasionalisme yang sehat, mencegah disintegrasi masyarakat, dan mencapai pembangunan nasional yang lebih stabil dan harmonis.

Komunitas pluralistik yang terdiri dari banyak kelompok dengan identitas yang berbeda, sering kali rentan terhadap konflik di masa mendatang. Konflik yang berasal dari perbedaan agama, etnis, atau budaya dapat mengintensifkan perpecahan sosial dan membahayakan kohesi nasional. Akibatnya, kebijakan negara harus dirumuskan untuk membangun lingkungan yang terbuka dan inklusif untuk wacana, memfasilitasi pemahaman, rasa hormat, dan kolaborasi di antara berbagai kelompok. Strategi-strategi ini tidak hanya meredakan ketegangan tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dalam perbedaan.

Kebijakan yang harus diterapkan dapat memfasilitasi dialog lintas kelompok adalah penerapan program pendidikan yang mempromosikan toleransi, rasa hormat

terhadap keragaman, dan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Pendidikan yang berpusat pada pemahaman lintas budaya dan agama dapat menumbuhkan keterbukaan terhadap keberagaman di kalangan masyarakat dan mengurangi kekerasan yang sering kali berasal dari ketidaktahuan atau prasangka buruk di antara kelompok-kelompok. Kurikulum pendidikan yang mengajarkan sejarah keberagaman nasional dan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat meningkatkan integrasi sosial dan menumbuhkan identitas nasional yang inklusif.

Kebijakan yang mempromosikan dialog antar agama dan etnis harus dilengkapi dengan pemberdayaan masyarakat minoritas. Kelompok yang terpinggirkan atau kurang terwakili kerap mengalami ketidakadilan dalam akses ke sumber daya dan peluang. Kebijakan yang menekankan keadilan sosial, hak yang setara, dan pemberdayaan ekonomi di semua lapisan masyarakat dapat mengurangi konflik antarkelompok. Inisiatif tindakan afirmatif atau kebijakan redistribusi sumber daya yang menangani masalah kelompok minoritas dapat menumbuhkan rasa keadilan yang meningkatkan kohesi sosial.

Negara harus memastikan bahwa peraturan hukum tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi. Dalam hal ini, penegakan hukum yang adil dan terbuka berfungsi sebagai landasan untuk membangun kepercayaan di antara kelompok-kelompok yang beragam. Sistem hukum yang efisien akan menjamin penyelesaian masalah secara damai, tanpa memicu lebih banyak kekerasan atau disintegrasi.

Dialog antar kelompok etnis dan agama dapat disemai melalui platform politik dan sosial, termasuk dialog para pemimpin agama, pertemuan para pemimpin masyarakat, dan acara budaya yang melibatkan berbagai kelompok. Keberagaman budaya dapat dihormati

melalui festival atau acara budaya yang menunjukkan identitas kelompok dan meningkatkan pemahaman di antara berbagai komunitas. Pemerintah, sebagai arsitek utama kebijakan publik, memikul tanggung jawab yang signifikan untuk memfasilitasi keterlibatan semua kelompok dalam proses pertumbuhan sosial dan politik. Integrasi sosial dapat dicapai melalui regulasi yang tepat dan penghormatan terhadap keadilan sosial. Suatu bangsa yang mencapai integrasi sosial yang mendalam dan luas akan mampu mencegah disintegrasi, mendukung nasionalisme yang sehat, dan mendorong pertumbuhan nasional yang lebih stabil, harmonis, dan tahan lama. Langkah-langkah yang memfasilitasi diskusi lintas kelompok etnis dan agama sangat penting untuk mendorong masa depan yang damai dan bersatu.

Strategi yang mendorong interaksi antar kelompok etnis dan agama juga harus mencakup inisiatif untuk memperkuat pengaruh organisasi keagamaan, budaya, dan sosial dalam masyarakat. Kolaborasi di antara kelompok-kelompok ini dapat menghasilkan kebijakan yang memperkuat jaringan sosial, sehingga mengurangi potensi konflik. Pentingnya kebijakan yang memfasilitasi wacana ini terlihat dalam inisiatif pemerintah yang mendorong terciptanya forum antaragama dan budaya, yang berfungsi sebagai tempat bagi berbagai kelompok untuk berkomunikasi, bertukar pengalaman, dan secara kolaboratif mencari solusi dari problem bersama. Kebijakan yang meningkatkan dialog antar kelompok ini dapat menumbuhkan nasionalisme yang sehat, yang tidak hanya menerima perbedaan tetapi juga memanfaatkan keragaman sebagai kekuatan untuk mencapai pembangunan nasional yang lebih stabil dan harmonis.

SIMPULAN

Nation and character building merupakan *never ending proses* dan melibatkan banyak aspek termasuk pengelolaan nilai nasionalisme, identitas

dan kadar kohesi di tengah masyarakat majemuk. Nasionalisme adalah elemen yang penting dimiliki suatu bangsa dalam keberlangsungannya namun ia perlu dirawat secara kolektif agar tidak berujung pada konflik dan perpecahan. Nasionalisme yang sehat berakar pada pengalaman dan ingatan bersama serta semangat bersama bukan hanya terikat oleh kesamaan ras, agama ataupun bahasa. Nasionalisme dapat berkembang ancaman karena menjelma menjadi sikap chauvinistik dan diskriminatif seperti fenomena yang terjadi di Amerika Serikat, India dan Myanmar. Keseimbangan dalam menanamkan nasionalisme agar tidak mengarah pada gerakan eksklusivitas yang berlebihan dan perpecahan menjadi sebuah keniscayaan. Kohesi dan integrasi sosial merupakan elemen penting dalam membangun persatuan di tengah masyarakat yang beragam. Kohesi sosial mensyaratkan nilai, norma dan kebijakan inklusif yang mendorong persatuan. Proses tersebut tidak sederhana karena ancaman konflik sosial kerap dipicu oleh keragaman etnis, agama dan budaya. Dalam konteks Indonesia, integrasi sosial harus dijalankan secara demokratis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945 agar stabilitas dan keharmonisan nasional dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, T. (2017). *Studi tentang prasangka sosial terhadap nonmuslim dikaji dari fundamentalisme, identitas sosial, dan religiusitas pada mahasiswa*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Psikologi, 2017.
- Aiqani, N., Insiyah, S., Yosarie, I., Halili. (2023). *Modul Jurnalisme Inklusif*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Anderson, B. (1999). *Nasionalisme Kini dan Esok*. Kompas.
- Anderson, B. (2020). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. In *The new social theory reader* (pp. 282–288). Routledge.
- Antara, I. K. A. M. (2020). *KEPEMIMPINAN YANG MELAYANI*.

- Aryadiningrat, I. N. L. H., Sundawa, D., & Suryadi, K. (2023). *Forming the Character of Discipline and Responsibility Through Character Education*. Indonesian Values and Character Education Journal, 6(1), 82-92.
- Asril, A., Jaenam, J., Syahrizal, S., Armalena, A., & Yuherman, Y. (2023). Peningkatan Nilai-Nilai Demokrasi dan Nasionalisme Pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1300–1309.
- Aziz, A. (2011). *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*. Pustaka Alvabet.
- Baidhaw, Z. (2005). *Pendidikan agama berwawasan Multikultural*. Erlangga.
- Bakers, M. (n.d.). *Penurunan Uni Soviet dan Genosida Rezim Komunis* (Vol. 3). Cambridge Stanford Books.
- Bauman, Z. (2004). *Conversations with Benedetto Vecchi. Z. Bauman.— Cambridge: Polity Press*.
- BBC News Indonesia. (2020). *Dampak kebijakan imigrasi Trump: Orang tua 545 anak migran yang terpisah belum ditemukan*.
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54655826>
- BPS. (2015). *Mengulik Data Suku di Indonesia, Situs BPS*.
<https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>
- Bredemeier, K. (2019). *Trump Tetap akan Bangun Tembok di Perbatasan, Meski Kongres Tak Kucurkan Dana*.
<https://www.voaindonesia.com/a/trump-tetap-akan-bangun-tembok-di-perbatasan-meski-kongres-tak-kucurkan-dana-4768117.html>
- Bryman, A. (2016). *Social research methods*. Oxford university press.
- Carr, D., Giddens, A., Duneier, M., & Appelbaum, R. P. (2018). *Introduction to sociology*. WW Norton & Company, Inc.
- Chrisnandi, Y. (2019). *PERPUSTAKAAN NASIONAL RI KATALOG DALAM TERBITAN*.
- Corneliya Saba, C. (2018). *HUBUNGAN ANTARA IDENTITAS SOSIAL DENGAN PRASANGKA TERHADAP PEMIMPIN YANG BERBEDA ETNIS*. Untag Surabaya.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dzaky, G. A. (2024). *Konflik Umat Islam dan Hindu di India Pada Era Narendra Modi Tahun 2014-2023*. Universitas Islam Indonesia.
- Education, P. (2007). Pearson education. *CENTRAL ASIA*, 13, 14.
- Ernada, S. E. Z., Molasy, H. D., & Prabhawati, A. (2024). *Nasionalisme dan Etnopolitik dalam Hubungan Internasional: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Indonesia Emas Group.
- Ernas, S. (2014). Dinamika Integrasi Sosial Di Papua Fenomena Masyarakat Fakfak Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Kawistara*, 4(1), 63–76.
<https://doi.org/10.22146/kawistara.5233>
- Febriansyah, F. (2023). *Analisis Faktor Kebijakan Pemerintah India di Era Narendra Modi Terhadap Masyarakat Muslim India Tahun 2014-2022*. Universitas Islam Indonesia.
- Felani, H., & Rochani Adi, I. (2022). Nasionalisme Religius dalam Film-Film Amerika dan Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 17(1), 97–116.
<https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss1.art7>
- Garna, Y. (1993). *Masyarakat Baduy di Banten” pada Masyarakat Terasing di Indonesia (Koentjaraningrat, dkk). Jakarta: Gramedia*.
- Habibah, S. M., Setyowati, R. N., & Fatmawati, F. (2022). Moderasi beragama dalam upaya internalisasi nilai toleransi pada generasi Z. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 126-135.
- Habibah, S. M., Kartika, R., & Rizqi, A. I. (2023). Multiculturalism transformation in the technological age: Challenges and opportunities. *Digital Theory, Culture & Society*, 1(2), 81-87.
- Hadziq, A. (2019). Nasionalisme Organisasi Mahasiswa Islam dalam Menangkal Radikalisme di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 4(1), 50–59.
- Hamid, E. S. (2012). Peran Pembangunan untuk Mengukuhkan Nasionalisme dan Membangun Karakter Bangsa. *Unisia*, (76), 41-46.
- Hartati, A. Y. (2010). Separatisme dalam

- konteks global (studi tentang eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS) sebagai gerakan separatis Indonesia). *Spektrum*, 7(2).
- Herawati, A. (2023). Perubahan Sosial Masyarakat di Masa New Normal (Analisis Menggunakan Perspektif Sosiologi Talcott Parsons). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 286–292.
- Hidir, A., & Malik, R. (2024). *Teori Sosiologi Modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hosseini-Zadeh, I. (2014). *WHY AREN'T MUSLIMS SPEAKING OUT AGAINST ISLAMIC STATE ATROCITIES?*
- Iramdhan, I. (2017). Paham Nasionalisme dan Pergerakan Kebangsaan di Indonesia dari Tahun 1900-1942. *Sosio E-Kons*, 9(1), 46–53.
- Kalsum, A. U., & Fauzan, F. (2020). *Integrasi sosial dalam membangun keharmonisan masyarakat*. *JAWI*, 2(1)
- Karn, V. A., Phillips, D. A., Blackstone, T., Parekh, B., & Sanders, P. (1998). *Race Relations in Britain: A Developing Agenda*.
- Kohn, H. (1984). Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya, terj. Sumantri Mertodipuro. Jakarta: PT Pembangunan Dan Penerbit Erlangga.
- Kusuma, C. (2018). *Identitas Sosial Keluarga Besar Majelis Rasulullah SAW (KBMR)* Tangerang Raya. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Kusuma, F. A. (2015). *Pembinaan semangat nasionalisme siswa melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu*. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN.
- Kusumawardani, A., & Faturachman. (2004). NASIONALISME. *Archives de Médecine Sociale*, 7(1), 61–72.
- Lickona, T. H. O. M. A. S. (1991). The Character on Development.
- Leylana, N., & Sarjito, A. (2024). Dampak Pemekaran Daerah terhadap Pertahanan Negara: Studi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(1), 29–45.
- Liliweri, A. (2018). *Prasangka, konflik, dan komunikasi antarbudaya*. Prenada Media.
- Martaniah, S. M. (1990). Konsep dan alat ukur kualitas berbangsa dan bernegara. *Laporan Penelitian. Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Mulkhan, U. M., Efendi, A., & Destalia, M. (2018). *EKSPLORASI ARISTOTELIAN VIRTUE ETHICS (AVE) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Indonesia)*.
- Mustakim, B. (2011). *Pendidikan karakter: membangun delapan karakter emas menuju Indonesia bermartabat*. Samudra Biru.
- Nafi'ah, S. A. (2020). *Memperkuat Identitas Bangsa Melalui Pendidikan Multikultural: Konsep–Prinsip–Implementasi*. Guepedia.
- Nathaniel, F. (2020). *Hindutva dan Politik Kekerasan terhadap Umat Islam di India*.
- Nugraheni, W. (2021). *POLICE BRUTALITY AND RACISM AGAINST BLACK PEOPLE IN THE UNITED STATES*. Universitas Gadjah Mada.
- Nurvita, A. I. (2018). *Peran guru sejarah dalam meningkatkan karakter nasionalis pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Almaarif Singosari Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Octavia, A., & Husniyah, A. (2023). Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Tirtayasa Journal of International Law*, 2(2), 109. <https://doi.org/10.51825/tjil.v2i2.21726>
- Pulungan, E. D. (2023). Populism in The United States During Donald Trump's Government: The Failure to Understand Human Identity from The Perspective of Constructivism. *Jurnal Politik Profetik*, 11(2), 186–203.
- Rahayu, T. E., & Hero, E. (2021). Konstruksi Identitas Sosial “Muslimah Motivations Riau” Dalam Gerakan Hijrah Melalui Instagram. *Medium*, 9(2), 185–200.
- Rachmiate, A. (2016). Membangun Kecerdasan Informasi Dalam Peneguhan Karakter Bangsa. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(2), 114–121.
- Renan, E. (2002). What is a Nation?(1882). In *Nationalism in Europe* (pp. 54–66). Routledge.
- Respa, D. (2023). *INTEGRASI SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT SUKU LAMPUNG DAN SUKU JAWA (Studi Kasus Di Kelurahan Menggala Selatan*

- Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang*). UIN Raden Intan Lampung.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2009). *Teori sosiologi: Dari teori sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Romli, H. K. (2015). *AKULTURASI DAN ASIMILASI DALAM KONTEKS INTERAKSI ANTAR ETNIK*.
- Said, N. (2009). *Masyarakat Muslim Makassar: studi pola-pola integrasi sosial antara Muslim Pagama dengan Muslim Sossorang*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama.
- Santoso, B. (2006). Bahasa dan identitas budaya. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 1(1), 44–49.
- Saraswati, D., Zakiyah, M., & Zulvarina, P. (2021). Reinterpretasi Nasionalisme Dengan Pendekatan Teori Matriks. *Waskita: Jurnal Pendidikan ...*, 5(2), 117–129.
<https://waskita.ub.ac.id/index.php/waskita/article/view/203%0Ahttps://waskita.ub.ac.id/index.php/waskita/article/download/203/133>
- Siagian, F. S. (2023). *Ancaman Non-Militer Terhadap Ibu Pertiwi, Dari Perspektif Hukum, Sosial-Politik*. Guepedia.
- Sidik, J. M. (2023). *Ukraina dan Perang Menegaskan Identitas Nasional*.
- Soedarno, P., Soedarno, P., Wiwoho, L. E., & Simangunsong, B. (1992). *Ilmu sosial dasar: buku panduan mahasiswa*.
- Sugarda, Y. B. (2022). *Multikulturalisme dan Toleransi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Susilo, S., & Rasul, J. (2009). Nasionalisme-Demokrasi-Civil Society. *Historia Vitae*, 23, 2.
- Tampi, G. J. (2015). *Nasionalisme Sukarno dan Nasionalisme Hatta: suatu studi perbandingan mengenai konsep nasionalisme menurut Sukarno dan Hatta*. Magister Sosiologi Agama Program Pascasarjana FTEO-UKSW.
- Taufik, T., & Pratiwi, S. A. (2021). American first: Kebijakan Donald Trump dalam pembatasan kaum imigran ke Amerika Serikat. *Intermestic: Journal of International Studies*, 6(1), 221–241.
- Tindaon, S. (2012). *Perlindungan atas Imigran Rohingya dalam Pelanggaran HAM Berat di Myanmar dari Aspek Hukum Internasional dan Hukum Nasional*.
- Trotsky, L. (2010). *Revolusi Yang Dikhianati*. Sleman: Resist Book
- Umikalsum, A., & Fauzan. (2019). Integrasi Sosial Dalam Membangun Keharmonisan Masyarakat. *Integrasi Sosial Dalam Membangun Keharmonisan Masyarakat JAWI*, 2(1), 65–86.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawiDOI:http://dx.doi.org/10.24042/jw.v2i1.2841>
- Widiasa, R. (2018). Bingkai identitas dalam konflik geopolitik: intervensi militer rusia di ukraina. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(1), 60–76.
- Yuliantoro, M. N. (2021). *Nalar Publik Ilmu Dan Agama*. UGM PRESS.
- Yusuf, A. B. A. (2014). *PEMIKIRAN ABU YUSUF TENTANG LARANGAN INTERVENSI PEMERINTAH DALAM MENETAPKAN HARGA*.
- Zahrotunnimah, Z. (2018). Pola Operasionalisasi Politik Identitas Di Indonesia. *Adalah*, 2(11).
- Zamzami, M. S. (2020). *Identitas Kesalehan dalam Al-Qur'an: Interpretasi Dogmatis-Fenomenologis*. IAIN Madura Press.
- Zulfahmi, M. R. (2023). *DAMPAK PERANG RUSIA-UKRAINA TERHADAP STABILITAS KEAMANAN REGIONAL EROPA= THE IMPACT OF THE RUSSIA-UKRAINE WAR ON EUROPEAN REGIONAL SECURITY STABILITY*. Universitas Hasanuddin.